

REKONSTRUKSI

PENGATURAN KEWENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Penelitian ini hakikatnya bertujuan melakukan rekonstruksi atas pengaturan kewenangan anggota legislatif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dimaksud dengan rekonstruksi, yaitu Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum dalam pengaturan kewenangan anggota legislatif dalam mencegah tindak pidana korupsi yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum. Nilai-nilai hukum yang berbagai dimensi itu dapat diungkap dengan kriminologi, yang diarahkan dengan *grand theory* Keadilan Bermartabat.

Dalam kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan: 1. Kewenangan anggota legislatif yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. 2. Penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif 3. Rekonstruksi kewenangan yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan dalam prespektif kriminologi.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berangkat dari paradigma konstruktivisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah *penelitian kualitatif*. Dengan pendekatan *socio-legal studies* penelitian ini akan meneliti sifat kriminogen terjadinya pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota legislatif selama ini, serta kebijakan kriminal yang sudah ditempuh yang dinilai belum mampu menanggulangnya. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya direkonstruksi kriminal agar dapat lebih efektif dalam penanggulangan korupsi ke depan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam bidang politik; maka perlu ada penyalanggunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari suatu pemegang kekuasaan, seperti suatu bentuk kekuasaan kolusif. Dalam hal ini kolosi antara elit ekonomi dan elit kekuasaan juga menjadi studi kritis dalam bentuk kejahatan kerah putih tersebut. Seperti dikemukakan Teguh Prasetyo, Kapitalisme di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap sektor negara. Ketergantungan seperti itu terlihat jelas antara Perusahaan yang mengusahakan penambahan kuota import daging sapi yang bekerja sama dengan anggota legislatif dan selanjutnya anggota legislatif itu bekerja sama lagi dengan Menteri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ditambah atau tidak ditambahnya kuota daging sapi yang akan diimport.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pengaturan Kewenangan, Anggota Legislatif

RECONSTRUCTION AN THE AUTHORITY OF THE LEGISLATIVE MEMBERS TO THE PREVENT THE CORRUPTIONS THAT BASED ON THE JUSTICE

ABSTRACT

The research aims to make a reconstruction on the authority of the legislative members to prevent the corruption. Reconstruction is an effort to reorientation and re evaluation and also rearrangement of the valves of law in the authority resulation of the legislative members to prevent the corruptions that has a sociology, politics, sosio-filosofis and socio cultural dimension based on the law.

The value of law that has some dimension can be showed by the criminology that has shown with the “Dignified Justice” as a gran theory.

Based on the background above, this research try to answer some question. 1. The authority of the legislative member that has a potention to cause the corruption. 2. The enforcement of the corruption that has done by legislative member. 3. The authority reconstruction that faced by the law that based on the justice in criminology perspective.

The method of this research is grown up by the constructivie me paradigma. Type of this research is using qualitative method. With the socio-legal studies this research want to find the criminogenic character that has been done by the legislative member, and the criminal policy that has been taken but still not effective to over the corruption in the future.

The result of this research shows that in politics need some abuse of power from the decision maker as Teguh Prasetyo said, capitalis in Indonesia has relied mainly on state power. The dependency has been seen clearly between company that try to force in adding import quote of the beef (collus meat) that has corporated with the legislative’s member and legislatives member has a good cooperation with the ministry who has an authority to decide whether it has to enlarge or not for the import quota of the enlarge or not for the import quota of the geef imported.

Key Words: Reconstruction, Ruler on Authority, Member of Legislative.